

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara demokratis yang memiliki berbagai macam suku, agama, ras, adat-istiadat, dan budaya yang majemuk. Penduduk Indonesia yang beragam mempunyai perbedaan antar wilayah. Hubungan hidup antar sesama manusia sering terjadi perbedaan ide dan pendapat. Perbedaan tersebut seharusnya bukan menjadi hambatan yang dipertentangkan, melainkan agar dapat bekerjasama dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Keragaman dan perbedaan akan menjadi permersatu bangsa, yakni hukum yang mengikat serta memaksa. Adanya hukum, rakyat Indonesia akan memiliki kesamaan didalamnya. Sejauh ini negara Indonesia masih konsisten berpedoman pada Pancasila yang mencerminkan kaidah pokok hidup berbangsa dan bernegara. Secara umum segala peraturan yang berlaku di Indonesia berdasarkan pada Pancasila termasuk penyelesaian masalah dengan musyawarah untuk mufakat.

Setiap warga negara perlu memahami bahwa musyawarah mufakat dapat memperkuat tali silaturahmi dan memperkuat pondasi NKRI berdasarkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat, baik secara langsung maupun perwakilan. Secara garis besar penyelenggaraan pemerintah berada di tangan rakyat berdasarkan konstitusi UUD 1945. Pelaksanaan demokrasi Pancasila bukan hanya untuk kepentingan sendiri, melainkan pada permusyawatan yang mencakup kebebasan dan kebersamaan. Menurut Suleman (2010:172):

Kata-kata kuncinya adalah kebersamaan, demokrasi berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat serta semangat gotong-royong dalam memajukan kehidupan bersama. Apabila musyawarah, mufakat dan gotong-royong berjalan dengan baik, akan terwujudlah tatanan demokrasi.

Keberadaan hukum di Indonesia terbagi menjadi dua macam, yakni tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis adalah segala aturan mengenai penyelenggaraan negara yang berupa tulisan. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat merupakan hukum dasar tidak tertulis dan kebiasaan berulang kali. Menurut undang-undang dasar 1945 pasal 37 ayat (1) dan (4), keputusan MPR diambil berdasarkan suara terbanyak tetapi hal ini sangat mengurangi kekeluargaan dan kepribadian bangsa. Contoh lain hukum tidak tertulis ialah pidato presiden pada tanggal 16 Agustus. Pelaksanaan musyawarah untuk mufakat di Indonesia pada saat ini mulai memudar, karena pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan dengan cara voting.

Di era globalisasi masyarakat mengalami perubahan sosial yang mengubah pola pikir dan kepribadian bangsa. Efek dari perubahan sosial menuntut agar semua orang siap menghadapi persoalan dan mampu mengikut perkembangan. Dampak negatif bagi bangsa Indonesia salah satunya ialah memudarnya musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Musyawarah merupakan kegiatan dalam pengambilan keputusan pada suatu forum dan agenda yang akan dilaksanakan bersama secara mufakat.

Memudarnya pelaksanaan musyawarah untuk mufakat juga tercermin dalam rapat karang taruna. Organisasi beranggotakan pemuda ini, sering mengadakan rapat rutin untuk membahas rencana program kerja atau suatu kegiatan yang dilakukan. Rapat rutin yang biasa diadakan setiap bulan sekali, pastilah ada

komunikasi didalamnya. Pembahasan-pembahasan atau pendapat dari seseorang tertentu harus benar-benar diperhatikan. Tak sedikit yang bisa dijumpai, konflik-konflik menimpa anggota karang taruna hanya diakibatkan dari komunikasi yang belum tertata dengan baik dan kesalahpahaman dalam menerima informasi. Rapat rutin karang taruna membahas juga beberapa masalah dalam lingkungan yang harus diselesaikan.

Rakyat Indonesia secara tidak langsung seharusnya melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal tersebut sejalan dengan isi Sila Keempat Pancasila, yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”. Kansil dan Kansil (2011:39), menyatakan bahwa:

Hakikat dari musyawarah untuk mufakat dalam kemurniannya adalah sesuatu ciri khas yang bersumber pada inti paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan untuk merumuskan dan/atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat, dengan jalan mengemukakan hikmat kebijaksanaan yang tiada lain daripada pikiran (rasio) yang sehat uang mengungkapkan dan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat sebagaimana yang menjadi tujuan pembentukan pemerintah negara termasuk dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pengaruh-pengaruh waktu, oleh semua wakil/utusan yang mencerminkan penjelmaan seluruh rakyat, untuk mencapai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat (mufakat) yang ditikadkan untuk melaksanakan secara jujur dan bertanggungjawab.

Musyawarah untuk mufakat pada dasarnya salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila sila keempat. Tujuan tersendiri adanya musyawarah untuk mufakat ialah membentuk rakyat yang harmonis, erat akan kekeluargaan, dan semangat kebersamaan. Ketiadaan musyawarah dalam menyelesaikan masalah dapat dikatakan memudarnya ciri khas dari bangsa

Indonesia. Kesesuaian akan hukum tersebut tidak lagi digunakan dan bukan menjadi budaya oleh kelompok tertentu saat ini.

Pergeseran masyarakat demokrasi oleh arus budaya globalisasi menjadi musyawarah untuk mufakat mulai luntur dan tinggalkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan menonjolnya sikap individualisme atau lebih mementingkan tujuan pribadi dan kelompok tertentu. Keadaan itu tentu dapat menghapuskan jiwa demokrasi yang tercermin dalam musyawarah untuk mufakat. Contoh nyata dalam lingkup kenegaraan dapat dilihat di gedung Dewan Perwakilan Rakyat pusat, yang kerap terjadi perbedaan atau perpecahan antar partai. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran dalam musyawarah untuk mufakat sudah mulai hilang tergeser oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Seperti halnya dalam organisasi karang taruna. Karang taruna merupakan salah satu wadah untuk membangun desa dan merupakan cermin dari desa tertentu.

Karang taruna ialah organisasi pemuda-pemudi sedesa yang melaksanakan program kerja, dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut peraturan menteri sosial republik Indonesia nomor 77/HUK/2010 karang taruna adalah “salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang diakui keberadaannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial”. Keberadaan karang taruna mempunyai peran untuk memajukan desa dan berdampak positif bagi warga sekitar melalui kegiatan yang dilakukan. Karang taruna juga mempunyai andil besar terhadap generasi penerus, karena setiap anggota harus siap menghadapi berbagai persoalan. Setiap anggota karang taruna yang melaksanakan kegiatan dapat membentuk karakter kuat, disiplin, mandiri, ataupun tanggung jawab. Beberapa

kegiatan yang dilakukan diantaranya untuk membangkitkan semangat gotong royong, baik antar anggota maupun warga desa setempat.

Pemahaman mengenai musyawarah untuk mufakat dipelajari dalam materi pelajaran demokrasi Pancasila. Pendidik mengajarkan materi musyawarah mufakat secara langsung kepada siswa. Pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat diantaranya dalam pembahasan piknik, pemilihan ketua kelas, serta jadwal kebersihan kelas. Calon guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan nantinya harus menguasai tata cara pelaksanaan musyawarah mufakat yang benar, karena hal tersebut dilakukan oleh para pendiri bangsa dalam membentuk dasar hukum. Musyawarah untuk mufakat berprinsip pada kekeluargaan dan kebersamaan yang diharapkan dapat membentuk pribadi luhur. Kemampuan calon guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengaplikasikan musyawarah untuk mufakat dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Namun saat ini masih dijumpai calon guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang kurang memahami musyawarah untuk mufakat.

Materi pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dijabarkan dalam kompetensi dasar, yakni demokrasi Pancasila. Mata pelajaran demokrasi Pancasila berupa musyawarah untuk mufakat dikaitkan dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk mewujudkan jiwa kebersamaan, kekeluargaan, sikap saling menerima atau memberi dan kejujuran. Musyawarah untuk mufakat merupakan salah satu hasil pemikiran dari bangsa Indonesia dan cara yang harus diutamakan dalam hal pengambilan keputusan. Langkah ini

merupakan cara yang diutamakan bangsa Indonesia dalam pengambilan keputusan maupun dalam memilih pengurus organisasi (Suwanto dan Indratno, 2009:114).

Musyawarah untuk mufakat dipelajari pada semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Muatan mengenai musyawarah untuk mufakat tertuang berbagai macam mata kuliah, sebagai contoh negara hukum dan demokrasi serta filsafat Pancasila. Relevansinya dengan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terletak pada visi. Visi program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu “...untuk membentuk bangsa yang berkarakter kuat dan memiliki kesadaran berkonstitusi menuju masyarakat madani”. Konsekuensi dari visi tersebut, maka calon guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus mampu menumbuhkan kesadaran berkonstitusi dan membentuk karakter yang kuat.

Pelaksanaan musyawarah untuk mufakat dalam rapat karang taruna penting dilakukan guna merumuskan program kerja atau agenda-agenda kegiatan. Musyawarah diharapkan agar anggota karang taruna mempunyai pemikiran yang kritis. Realitasnya di dukuh Sumberejo, pelaksanaan musyawarah untuk mufakat bukan merupakan hal yang diutamakan dalam pembahasan rapat karang taruna. Langkah-langkah dalam musyawarah untuk mufakat mulai ditinggalkan, karena sebagai besar para anggota acuh tak acuh terhadap kelangsungan rapat. Gejala lain yang dapat dilihat dalam rapat ialah sikap otoriter dari ketua ataupun masing-masing perorangan yang menghilangkan prosedur dalam musayawarah mufakat karena tidak mau ambil pusing.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, hal ini mendorong peneliti untuk mengajukan kajian ilmiah mengenai pelaksanaan musyawarah untuk mufakat pada rapat karang taruna Sumber Cahaya di Dukuh Sumberejo Desa Patihan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. Alasan peneliti melakukan penelitian dengan tema ini karena realita mulai memudar pelaksanaan musyawarah untuk mufakat dalam rapat Karang Taruna Sumber Cahaya di Dukuh Sumberejo Desa Patihan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.

### **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian. Permasalahan harus diketahui terlebih dahulu sebelum peneliti melakukan penelitian. Permasalahan yang sangat luas akan mempersulit peneliti. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan musyawarah untuk mufakat dalam rapat Karang Taruna Sumber Cahaya di Dukuh Sumberejo Desa Patihan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan musyawarah untuk mufakat saat rapat Karang Taruna Sumber Cahaya di Dukuh Sumberejo Desa Patihan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen?
3. Bagaimana solusi dalam pelaksanaan musyawarah untuk mufakat saat rapat Karang Taruna Sumber Cahaya di Dukuh Sumberejo Desa Patihan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan merupakan pedoman yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai pada langkah pemecahan masalahnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk pelaksanaan musyawarah untuk mufakat dalam rapat Karang Taruna Sumber Cahaya di Dukuh Sumberejo Desa Patihan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.
2. Untuk mendeskripsikan kendala dalam pelaksanaan musyawarah untuk mufakat saat rapat Karang Taruna Sumber Cahaya di Dukuh Sumberejo Desa Patihan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.
3. Untuk mendeskripsikan solusi dalam pelaksanaan musyawarah untuk mufakat saat rapat Karang Taruna Sumber Cahaya di Dukuh Sumberejo Desa Patihan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.

### **D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini tentang pelaksanaan musyawarah untuk mufakat dalam rapat karang taruna Sumber Cahaya di Dukuh Sumberejo Desa Patihan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. Penelitian atau karya ilmiah diharapkan mampu memberikan manfaat yang dapat dikembangkan. Manfaat atau Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu teoritis dan praktis. Adapun penjelasannya diuraikan sebagai berikut.



1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya, maupun masyarakat pada umumnya mengenai pelaksanaan musyawarah untuk mufakat dalam rapat karang taruna.
- b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk kegiatan selanjutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada karang taruna mengenai pentingnya pelaksanaan musyawarah untuk mufakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang tata cara musyawarah untuk mufakat dalam rapat karang taruna.

### **E. Daftar Istilah**

- 1. Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula (Abdullah, 1987:5).
- 2. Musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama yang telah disepakati dalam memecahkan suatu masalah (Nurmuharimah, 2007:65). Musyawarah sebagai upaya pengambilan keputusan yang terbaik tentang suatu persoalan dan semua orang bebas menyampaikan gagasan dalam forum.

3. Mufakat adalah mencapai kata sepakat (Suwanto dkk, 2010:35). Suatu kesepakatan dalam forum tertentu yang telah disetujui oleh sejumlah anggota tanpa adanya permasalahan atau pertentangan yang panjang antara beberapa pihak.
4. Rapat adalah komunikasi timbal balik dengan sarana bahasa antara dua orang atau lebih untuk memperdalam suatu masalah, agar dapat mencapai kesepakatan dan memutuskan pengambilan langkah tertentu dalam rangka suatu kerja sama yang tetap (Dwiwibawa dan Riyanto, 2008: 63).
5. Karang taruna adalah salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang diakui keberadaannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 77/HUK/2010).